



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MAMUJU

BUPATI MAMUJU,




Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran huruf A angka 2 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

- Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.


**KESATU :** Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki:

- a. tugas dan wewenang yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- b. tugas dan wewenang lainnya paling sedikit meliputi:
  1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

**KETIGA :** Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki:

- a. tugas dan wewenang yaitu:
  1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	



6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  2. memeriksa kas secara periodik;
  3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

**KEEMPAT** : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:

1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

**KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki:

- a. tugas dan wewenang yaitu:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- b. tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  2. memeriksa kas secara periodik;
  3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

**KEENAM** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:




- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

**KETUJUH** : Kepada Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya sesuai standar harga satuan yang ditetapkan tahun berkenaan;


**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju pada anggaran Belanja masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran berjalan.

**KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 2 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BPKAD	




BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

**TEMBUSAN:** Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.
6. Perangkat Daerah yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : TAHUN 2026

TANGGAL : JANUARI 2026

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**

No Urut	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	SKPD
1	2	3	4	5
1	IMAM SAFI'I, S.IP. NIP. 197510252014121001	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	SEKRETARIAT DAERAH / KDH / WKDH
2	NURHIDAYA, SE., MM. NIP. 197411242006042026	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	SEKRETARIAT DPRD
3	DARNAWATI, SE. MM. NIP. 197112272007012019	Pembina IV / a	Bendahara Pengeluaran	INSPEKTORAT DAERAH
4	HASNAWIAH NIP. 197805032014072002	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	FERIANI NIP. 198202122009012002	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6	ADE SULHAJ ANIRAH, S.Ak. NIP. 199804232022032010	Penata Muda III / a	Bendahara Penerimaan	
7	MARYAM NIP. 198107272007012016	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8	ADE PUTRA MUHLIS NIP. 198501012014071002	Pengatur II / c	Bendahara Penerimaan	
9	RUSMIATY N. SE. NIP. 198108182008012014	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
10	SITTI SALEHA NIP. 198202272009012001	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	MUH. ALI HABIBIE YUSUF NIP. 197610212009011003	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
12	SYARIFUDDIN NIP. 198311162008011004	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
13	IRWAN, SE NIP. 198310112014071003	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
14	MASRIANI, S.IP. NIP. 198209042007012008	Penata III / c	Bendahara Penerimaan	
15	HADRIANI, SE. NIP. 198110092008012015	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran	DINAS KESEHATAN
16	PATMAWATI, SE. NIP. 198108182014112002	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
17	HASNAWATY, SKM. NIP. 197801122014072001	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Penerimaan Pembantu	
18	SYAMSIAH, S.Sos. NIP. 198404122010012006	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	SALASIAH NIP. 197706072014122002	Pengatur II / c	Bendahara Penerimaan	
20	ROSMAWATI NIP. 198505172010012038	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
21	SURIANI, SE NIP. 198109122014112001	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS SOSIAL
22	ASER NIP. 198005022014071003	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23	YULIANA, SE NIP. 198008202008012013	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran	DINAS KETAHANAN PANGAN
24	NURLIATI, SE. NIP. 198105172009012001	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
25	RUBIANA NIP. 197506172012122001	Pengatur II / c	Bendahara Penerimaan	
26	SUMIATI NIP. 196911102006042023	Penata Muda, III/a III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

1	2	3	4	5
27	SITTI NAIMAH NIP. 198302082009012007	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
28	MUSDALIFAH, Amd.Keb. NIP. 198408312011012009	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
29	ANITA RAMADHANI, ST. NIP. 198401142014122001	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	DINAS PERHUBUNGAN
30	NURLAELA NIP. 198302282014072001	Pengatur Muda Tk.I II / b	Bendahara Penerimaan	
31	FAUZIAH, SE, M.Si. NIP. 198104122014072003	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
32	SUMAIYA AMIN, S.T NIP. 199303142022032004	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
33	SUJADI LENDANG, A.Md. NIP. 198104112014071006	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
34	DARMAWATI NIP. 198208182008012014	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35	RAMLAH. AR NIP. 198304022008012011	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
36	SANTY NIP. 198001152007012007	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
37	MUHAMMAD HASIBU, S.IP. NIP. 197212232007011020	Penata III / c	Bendahara Penerimaan	
38	BAHRI, SE NIP. 198010062014121001	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
39	NUR AMRI BAHE, SP. NIP. 198012092007012015	Penata III / c	Bendahara Penerimaan	
40	HANNA MEITY NIP. 198405262009012001	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS PERKEBUNAN
41	MASTIN KARNO NIP. 197705102002121013	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	DINAS PERDAGANGAN
42	HERWAN NIP. 197712272009011007	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Penerimaan	
43	MEGAWATI NIP. 198210282007012014	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
44	MUHAMMAD ALIMIN, SE. NIP. 197203172008011012	Penata III / c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN UMUM
45	NUR AENI BACHTIAR, S.IP. NIP. 198206022009012004	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
46	YULIANA NIP. 198407022010012015	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN PEREKONOMIAN
47	SUDARMIN M. NIP. 197405052007011035	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN HUKUM
48	JUNIARTI NIP. 198501042012122004	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
49	RASMAH USMAN, S.Ag. NIP. 197506132008012007	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
50	HASBAHUDDIN, S.IP. NIP. 198212302010011002	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
51	ISRARUDDIN MUJIN, AMD.KEP. NIP. 198305062009011009	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
52	SUPRIANY, S.SOS. NIP. 198112162010012019	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
53	MARLIANTI NIP. 197305152009012005	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN ORGANISASI
54	IRMA YASIS, SE NIP. 198302182014072002	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
55	ROSDIANAH NIP. 197403152007012021	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAGIAN KERJASAMA
56	ANDI ERNAWATI NIP. 197511082010012004	Pengatur TK. I II / d	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN MAMUJU
57	MATOR NIP. 198504212008011001	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN KAREMA

**PARAF KOORDINASI**




ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BPKAD

KEPALA BAGIAN HUKUM



1	2	3	4	5
58	HASNAH NIP. 197907262014072001	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN BINANGA
59	KURNIATI NIP. 198312312002122003	Pengatur Tk. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN RIMUKU
60	RUSMA TAHIR NIP. 198609062010012028	Pengatur Tk. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN MAMUNYU
61	H. SYAMSUL AMIN, S.Pd. NIP. 197312312006041042	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN SIMBORO
62	MARLINA NIP. 198005282014122003	Pengatur Muda Tk. I II / b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN SIMBORO
63	ROSMIATI NIP. 198003102010012001	Pengatur Tk. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN RANGAS
64	HARMAN, S.Sos.I NIP. 198102282010011021	Penata Tk. I III / d	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN KALUKKU
65	IKAFERIANA L. NIP. 198502252010012037	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN KALUKKU
66	M. IDRUS SAM NIP. 198004052007011013	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN BEBANGA
67	YARDAWIAH, S.Pd. NIP. 198006272008012013	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN SINYONYOI
68	IRMA WAHAB NIP. 198210162014122001	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN SINYONYOI SELATAN
69	SUKARMAN NIP. 198410012014121001	Pengatur Muda Tk. I II / b	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN TAPALANG
70	SURIANSA NIP. 197912312012121008	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN GALUNG
71	HAPSI, S.IP. NIP. 198007142010011017	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN KASAMBANG
72	FATMAWATI NIP. 198208162010012003	Pengatur Tk. I II / d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KELURAHAN DAYANGINNA
73	SRIDIANA, S.IP. NIP. 198312302009012002	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN TAPALANG BARAT
74	JUNANIA L. NATANG NIP. 197503312007012017	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN KALUMPANG
75	CAHYADI YOHAN KALIPUNG NIP. 197805012014121003	Pengatur II / c	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN BONEHAU
76	NURSAMSU, A.Md. NIP. 197810102008012019	Penata Muda Tk. I III / b	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN PAPALANG
77	MULIADI NIP. 198203132002121006	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN SAMPAGA
78	MUHAMMAD RAIS NIP. 197209222009061004	Pengatur Tk. I II / d	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN TOMMO
79	SYAFIYUDDIN YUSUF NIP. 198104052009011008	Penata Muda III / a	Bendahara Pengeluaran	KECAMATAN BALABALAKANG

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BPKAD	

BUPATI MAMUJU,

  
SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	